

adm publik

Erike Qinata Ferdiansyah_202014102 (Jurnal).pdf

 Universitas Abdurachman Saleh

Document Details

Submission ID

trn:oid::8135:74006328

Submission Date

Dec 14, 2024, 4:18 AM GMT+7

Download Date

Dec 18, 2024, 10:52 AM GMT+7

File Name

Erike Qinata Ferdiansyah_202014102 (Jurnal).pdf

File Size

336.3 KB

9 Pages

3,599 Words

22,495 Characters

17% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text
- ▶ Cited Text
- ▶ Small Matches (less than 12 words)

Exclusions

- ▶ 206 Excluded Sources

Top Sources

- 17%  Internet sources
- 10%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 17% Internet sources
- 10% Publications
- 0% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	
	ejournal.uit-lirboyo.ac.id	1%
2	Internet	
	ejournal.unmus.ac.id	1%
3	Internet	
	ejournal.upnjatim.ac.id	1%
4	Internet	
	www.studocu.com	1%
5	Publication	
	Deni Pratidiana, Nunung Muhayatun. "Analisis Kelancaran Prosedural Matematis..."	1%
6	Internet	
	ojs.unimal.ac.id	1%
7	Internet	
	repository.unigal.ac.id	1%
8	Internet	
	conference.unisnu.ac.id	1%
9	Internet	
	ejournal.pps.ung.ac.id	1%
10	Internet	
	konsultasiskripsi.com	1%
11	Internet	
	synergy.pelantarpress.co.id	1%

12	Internet	repository.upnjatim.ac.id	1%
13	Publication	Pirman Nursyamsi. "Segregasi Sosial Pasca Pemilu 2019 dan Pentingnya Pendidik..."	1%
14	Internet	e-journal.iyb.ac.id	1%
15	Internet	www.ejournal.iahntp.ac.id	1%
16	Publication	Angela Kelly Rori, Recky Sendouw, Julien Biringan. "Efektivitas Pelayanan Akta Ke..."	0%
17	Internet	ejournal.uigm.ac.id	0%
18	Internet	jurnal.umsrappang.ac.id	0%
19	Internet	koran-jakarta.com	0%
20	Internet	desaparakansalam.blogspot.com	0%
21	Internet	digilib.uinkhas.ac.id	0%
22	Internet	www.slideshare.net	0%
23	Internet	repository.unj.ac.id	0%
24	Internet	eprints.uad.ac.id	0%
25	Internet	www.ejournal.warmadewa.ac.id	0%

26	Internet	zh.scribd.com	0%
27	Internet	e-journal.upstegal.ac.id	0%
28	Internet	eprints.uns.ac.id	0%
29	Internet	journal-stiyappimakassar.ac.id	0%
30	Internet	journal.student.uny.ac.id	0%
31	Internet	repository.upy.ac.id	0%
32	Internet	son-show.com	0%

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 188/429/P/001.3/2022 TENTANG TATA CARA ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2023 DI DESA KALIBAGOR KECAMATAN SITUBONDO KABUPATEN SITUBONDO

Erike Qinata Ferdiansyah¹, Eddy Basuki², Senain³

^{1,2,3} Universitas Abdurachman Saleh, FISIP Prodi Administrasi Publik, Situbondo

¹Email: erikelacibolala@gmail.com

Abstrak

Salah satu bentuk subsidi pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan yaitu dengan memberikan subsidi pupuk. Penetapan harga yang diberikan oleh pemerintah merupakan salah satu upaya pemerintah kepada pelaku pasar agar menjual Pupuk bersubsidi dengan harga yang sudah ditetapkan. Penelitian ini membahas tentang alokasi dan (HET) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Situbondo Tentang Alokasi Dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023 Di Desa Kalibagor Kabupaten Situbondo. Pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya berada dibawah tanggung jawab menteri pertanian. Namun dalam praktiknya terdapat kios yang menjual pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian ini di Desa Kalibagor Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo metode dalam pengumpulan yaitu observasi wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa Peraturan Bupati Situbondo Nomor 188/429/P/001.3/2022 Tentang Alokasi Dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023 di Desa Kalibagor Kabupaten Situbondo ditinjau dari model teori George C. Edward III tidak berjalan dengan maksimal dengan peraturan Bupati yang berlaku. Dikarenakan dalam kasus dilapangan terdapat para petani yang membeli pupuk dengan harga yang tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.

Kata kunci: Implementasi, Peraturan Bupati, dan Pupuk Bersubsidi

Abstract

One form of government subsidy that helps realize food security is fertilizer subsidies. Pricing provided by the government is one of the government's efforts to market actors to sell subsidized fertilizers at a predetermined price. This research discusses the allocation and maximum retail price in the Situbondo Regent Regulation on the Allocation and maximum retail price of Subsidized Fertilizers for the Agricultural Sector for the 2023 Budget Year in Kalibagor Village, Situbondo Regency. Subsidized fertilizers are goods under supervision whose procurement and distribution are under the responsibility of the minister of agriculture. However, some kiosks sell subsidized fertilizers outside the applicable regulations. This type of research uses descriptive qualitative methods. The location of this research is in Kalibagor Village, Situbondo District, Situbondo Regency; the methods of collection are observation, interviews, and documentation. Based on the results of the study, it can be concluded that the Situbondo Regent Regulation Number 188/429/P/001.3/2022 concerning allocation and maximum retail price of Subsidized Fertilizers for the Agricultural Sector for the 2023 Budget Year in Kalibagor Village,

Situbondo Regency in terms of the George C. Edward III theoretical model does not run optimally with the regulation. Edward III's theory model does not run optimally with the applicable Regent regulations. This is because, in the case of the field, there are farmers who buy fertilizer at prices that are not by the maximum retail price set by the Government.

Keywords: *Implementation, of Regent Regulation, and Subsidized Fertilizer*

PENDAHULUAN

Subsidi yaitu salah satu bentuk bantuan pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dengan membayar sebagian harga yang seharusnya dibayar oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu untuk membeli suatu barang atau jasa yang menyangkut kepentingan hidup orang banyak. Peraturan tentang subsidi pupuk merupakan suatu langkah awal dalam penyediaan dan penggunaan pupuk untuk kegiatan usaha tani. Pupuk juga merupakan salah satu faktor produksi yang menentukan produktivitas usaha tani. Oleh karena itu sejarah keberhasilan penyediaan pangan terutama beras, banyak ditentukan oleh keberadaan pupuk.

Permasalahan pada pendistribusian pupuk menjadi masalah yang sering dihadapi oleh para petani khususnya untuk mendapatkan pupuk subsidi dari pemerintah. hal ini ditunjukkan dengan adanya kelangkaan pupuk bersubsidi. Dampaknya yaitu harga pupuk pengecer tidak sepenuhnya mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pada Peraturan Bupati Peraturan Bupati Situbondo Nomor 188/429/P/001.3/2022 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023 Di Desa Kalibagor Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, Harga 1kg subsidi pupuk Urea Rp 2.250, harga 1 Zak dengan berat 50 kg dijual dengan harga Rp 112.500, harga pupuk 1kg NPK yaitu Rp 2300, harga 1 zak dengan 50kg yaitu Rp 115.000 harga pupuk bersubsidi tersebut sudah di tetapkan oleh pemerintah.

Tabel 1.1 Jumlah Petani

Nama Kelompok	Jumlah Petani sawah	Jumlah Petani Ladang	Jumlah Keseluruhan petani
Kelompok Tani Karya Bakti	20 Orang	106 Orang	126 Orang
Kelompok Tani Nusa Indah	33 Orang	13 orang	46 Orang
Kelompok Tani Makmur	57 Orang	29 Orang	86 Orang
Kelompok Tani Jaya	-	90 Orang	90 Orang
Total	110 Orang	238 Orang	348 Orang

Sumber: Kantor Desa Kalibagor

Pada tabel 1.2 menjelaskan bahwa dari 104 orang jumlah petani pada kelompok tani makmur yang berjumlah 57 orang, petani yang memiliki luas lahan 0,6 hektar terdiri dari 11 orang petani, yaitu salah satunya bapak Sukarsih, Supiyati, dan sumarwa, selain itu masi ada 11 orang petani yang memiliki luas lahan diatas 2 hektar mendapatkan

pupuk bersubsidi salah satunya yaitu bapak Ivan Vauzan, ikawati, sedangkan batas maksimal dalam perolehan pupuk bersubsidi yaitu 2 hektar.

Desa Kalibagor mendapatkan bantuan subsidi Pupuk berupa subsidi pupuk Urea dan NPK untuk subsidi pupuk Urea dengan jumlah 901 Ton, sedangkan untuk pupuk NPK dengan jumlah 461 ton pupuk subsidi. Pada penyaluran pupuk tersebut disalurkan berupa 1 karung dengan berat 50 kg. Desa Kalibagor terdapat 2 kios yaitu: kios Tanara mendapatkan 91 ton setara dengan 1820 sak dengan berat 50 kg pupuk urea, sedangkan pupuk subsidi NPK mendapatkan 47 ton setara dengan 940 sak dengan berat 50 kg. Untuk kios kedua yaitu kios Sumber Makmur mendapatkan 100 ton subsidi pupuk setara dengan 2000 karung dengan berat 50 kg pupuk Subsidi urea, sedangkan pupuk Subsidi NPK mendapatkan 67 ton setara dengan 1340 persak dengan berat 50kg.

Akan tetapi pada praktik penjualan pupuk subsidi di Desa Kalibagor, pemilik kios menjual pupuk subsidi tidak sesuai dengan HET (harga Eceran Tertinggi) sehingga petani masi kekurangan pupuk subsidi. Untuk mendapatkan subsidi pupuk Petani harus memiliki luas lahan minimal 0,5 hektar dan maksimal 2 hektar. sehingga pada pelaksanaannya ada sekitar lima orang petani yang memiliki luas lahan 0,3 hektar mendapatkan pupuk bersubsidi. Selain itu juga pembagian pupuk subsidi dilihat dari luas sawa yang dimiliki oleh petani, untuk petani yang memiliki luas sawah 0,5 hektar akan mendapatkan pupuk subsidi urea sebanyak 42 kg dan pupuk NPK sebanyak 22 kg, sedangkan petani yang memiliki luas sawah 2 hektar mendapatkan subsidi pupuk urea sebanyak 168 kg dan pupuk subsidi NPK sebanyak 88 kg.

Sehingga untuk petani yang memiliki luas sawa di bawah 1 hektar mengeluh dikarenakan pupuk subsidi yang diperoleh tidak cukup pada saat musim tanam padi. Pada Desa Kalibagor para petani dibagi menjadi 4 kelompok tani yang akan mempermudah dalam pembelian subsidi pupuk. Dari 4 kelompok tani, 3 kelompok tani yang mengelola lahan kering dan sawah yaitu: Kelompok tani karya bakti dengan jumlah 20 orang petani sawah mendapatkan subsidi pupuk urea sebanyak 3.366 kg, sedangkan pupuk NPK sebanyak 2.073 kg, luas keseluruhan sawa pada kelompok tani karya bakti yaitu 12 hektar. Kelompok tani Nusa Indah dengan jumlah 33 orang petani mendapatkan subsidi pupuk sebesar 6.789 kg, sedangkan pupuk NPK sebanyak 4.029 kg dengan luas keseluruhan sawah pada kelompok tani nusa indah yaitu 13 hektar. Sedangkan di kelompok Tani Makmur dengan jumlah orang 57 orang sawah mendapatkan pupuk sebanyak 9.090 kg, sedangkan pupuk NPK sebanyak 1.407 kg dengan luas 15 hektar. Sehingga keseluruhan luas sawah di Desa Kalibagor yaitu 40 hektar.

Sehingga permasalahan yang terjadi di Desa Kalibagor terkait pupuk bersubsidi yaitu Perencanaan alokasi kebutuhan pupuk yang tidak tepat sasaran dalam proses penyaluran pupuk terhadap petani, lemahnya pengawasan subsidi pupuk yang belum maksimal sehingga hampir setiap tahun mengakibatkan kelangkaan pupuk subsidi dalam musim tanam padi, adanya kelangkaan pupuk dan kurangnya perolehan pupuk subsidi yang di dapat oleh petani yang memiliki luas sawah di bawah 1 hektar mengharuskan para petani menggunakan pupuk non subsidi agar tidak gagal tanam. Lemahnya pengawasan subsidi pupuk juga mengakibatkan harga subsidi pupuk melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

Upaya ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Peraturan Bupati Situbondo Nomor 188/429/P/001.3/2022 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023 Di Desa Kalibagor Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo menggunakan Model Menurut George C. Edward III (1980).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dikarenakan dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengungkapkan fakta yang ada dilapangan sejera jujur dan apa adanya, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, wawancara, dan bukan gambar mekipun terdapat data berupa angka dalam penelitian ini penggunaannya hanya sebatas sebagai penegasan dan penjelas. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif merupakan prosedur pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh) sehingga tidak diperkenankan memisahkan suatu individu atau kelompok kedalam suatu variabel maupun hipotesis, tetapi perlu dipandang sebagai satuan keutuhan.

OBJEK PENELITIAN

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan penelitian, penetapan lokasi penelitian sangat penting untuk mempertanggung jawabkan data yang akan diperoleh.

Lokasi dalam penelitian ini yaitu Desa Kalibagor, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan memiliki Permasalahan yang menarik untuk diteliti sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti, selain itu lokasi penelitian yang mudah dijangkau oleh peneliti sehingga pengmpulan data dapat dilakukan dengan efektif.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui studi lapangan yaitu dengan melakukan penelitian langsung yang dilakukan dengan cara:

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan data langsung dari lapangan yang menjadi objek penelitian, dalam hal ini peneliti benar-benar melihat langsung ke lokasi agar peneliti memahami proses tertentu

b. Wawancara

Wawancara ialah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi melalui proses tanya jawab. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semistruktur yang dapat menemukan permasalahan secara terbuka. Peneliti sendiri yang akan menjadi (interviewer) sedangkan narasumber menjadi (interview) adalah informan utama dan informan pendukung.

c. Dokumentasi

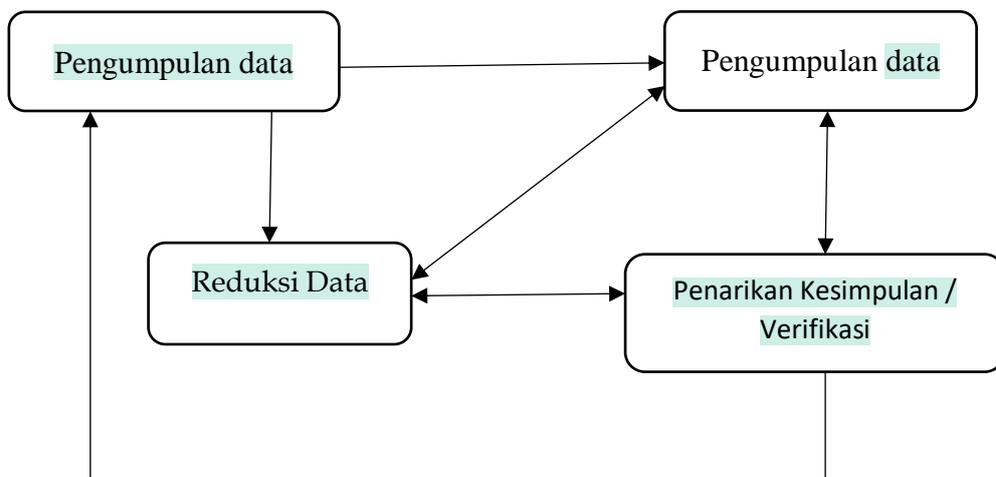
Dokumentasi merupakan pelengkap dalam pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian akan lebih dipercaya bila ada dokumenrasi berupa foto, cacatan wawancara, cacatan dilapangan, dokumen pertanggung jawaban.

METODE ANALISIS DATA

Teknis analisis data merupakan proses penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, yang telah dijabarkan dalam kelompok dan disusun pada pola yang paling penting dan disimpulkan.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Menurut Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2017:133) analisis data dilakukan terus menerus hingga data tersebut jenuh.

Berikut gambar teknik analisis data model interaktif (*Interactive model*) yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1984):



Gambar 1 Komponen Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman (1984)

Komponen di atas Menurut Miles dan Huberman (1984) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pengumpulan Data (Data collection)**
Proses analisis data dimulai dengan pengumpulan data, sesuai dengan teknik pengumpulan data, maka pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber tersebut dibaca, dipahami, dipelajari, dan ditelaah.
- Reduksi Data (Data Reduksi)**
Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data dan informasi di lapangan. Pada proses ini dilakukan pengklasifikasi data secara selektif agar data lebih mengarah pada permasalahan dan dapat membantu proses analisa (Miles dan Huberman). Salah satu langkah yang dilakukan untuk menajamkan analisis, yaitu dengan cara menggolongkan atau pengkategorian kedalam setiap permasalahan melalui uraian singkat, menghapus data yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi.
- Penyajian Data (data Display)**
Penyajian Data merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh suatu kesimpulan sebagai temuan penelitian.

16 Penyajian data yang dimaksud yaitu untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.

d. Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Kesimpulan dapat bersifat sementara apabila bukti-bukti yang diperoleh tidak kuat dan tidak mendukung dalam pengumpulan data. Kesimpulan tidak dapat dirubah apabila bukti-bukti yang diperoleh sangat valid dan konsisten pada saat pengumpulan data dilapangan. Verifikasi yaitu proses akhir dalam analisis data, verifikasi merupakan penguji kebenaran, kecocokan dankekukuhan dari makna-makna sehingga data tersebut tervaliditasi kebenarannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

19 Desa Kalibagor merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo dengan Kode Pos 68314. Desa Kalibagor memiliki luas wilayah yaitu seluas 300 ha yang dimana jumlah penduduk desa kalibagor yaitu 3550 jiwa dengan jumlah laki-laki yaitu 1765 jiwa dan jumlah perempuan 1785 jiwa. Selain itu juga Desa Kalibagor merupakan Desa dengan mata pencarian berupa industri genteng di seantero kecamatan situbondo dan pertanian. Penyaluran pupuk bersubsidi yang berhak melakukan penebusan pupuk bersubsidi yaitu para petani yang masuk dalam kelompok tani dan telah terdaftar dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Pada Desa Kalibagor mendapatkan bantuan pupuk bersubsidi berupa pupuk urea dan pupuk NPK Poska yang dimana dalam perolehan pupuk bersubsidi memiliki syarat tertentu sepertipara petani harus memiliki luas lahan minimal 0,5 dan maksimal 2 hektar persyaratan tersebut sudah terdapat dalam peraturan sehingga para petani yang memiliki lahan tidak sesuai dengan peraturan tidak diberpolehkan membeli pupuk bersubsidi. Dalam pengambilan pupuk bersubsidi di Desa Kalibagor para petani harus membeli pupuk bersubsidi di kios yang sudah ditentukan jumlah kios yang ada di Desa Kalibagor terdapat 2 (dua) kios. Selain itu satu kios yaitu kios sumber makmur (Kios2) menerima pembeli dari Desa sebelah lebih tepatnya Desa Kotakan dikarena pada saat pengalokasian pupuk bersubsidi sebagian Desa Kotakan masuk ke Desa Kalibagor sehingga sebagian petani Desa Kotakan yang sudah terdata diperbolehkan untuk mengambil pupuk bersubsidi di Desa Kalibagor dengan syarat para petani Desa Kotakan harus menunjukkan persyaratan berupa RDKK yang sudah dimiliki oleh ketua kelompok tani (poktani). Untuk mengkaji Implementasi Peraturan Bupati Situbondo Nomor 188/429/P/001.3/2022 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023 di Desa Kalibagor Kecamatan Situbondo peneliti menggunakan teori model George C. Edward III (1980) dengan empat faktor di antaranya:

7 1. Komunikasi

10 Komunikasi dapat menentukan keberhasilan atau pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dari hasil wawancara terdapat 3 faktor komunikasi yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan yaitu: (1) sosialisasi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik. Dengan adanya sosialisasi yang di adakan akan menghindari terjadinya salah pengertian yang biasanya terjadi pada

Lini III dan Lini IV. Kesimpulan dari hasil wawancara yaitu para petugas khususnya Petugas Penyuluhan Lapangan sudah memberikan sosialisasi kepada pihak distributor, kios dan petani terkait proses pembelian pupuk bersubsidi dan para distributor, kios dan petani memahami apa yang sudah disampaikan oleh pihak Petugas Penyuluhan Lapangan. (2) pelaksanaan merupakan komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan, dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi akan diawasi oleh petugas yang sudah ditugaskan untuk memantau jalannya penyaluran pupuk bersubsidi. (3) konsistensi pada pelaksanaan kebijakan bisa dikatakan sudah berjalan sesuai sebagaimana mestinya.

2. Sumberdaya

Suatu kebijakan memerlukan dukungan sumberdaya yang memadai baik sumberdaya manusia maupun non finansial. Dari hasil wawancara dapat dikatakan bahwa sumberdaya manusia atau staff dinas Pertanian Khususnya dibidang penyuluhan sangatlah kurang, sehigga mengakibatkan staff melalukan dua pekerjaan, agar pada saat penyaluran pupuk bersubsidi berjalan dengan lancar. Pada fasilitas sarana dan prasarana yang digunakan pihak distribusi memfasilitasi transportasi pengangkutan pupuk bersubsidi kepada kios. Sumber daya finansial merupakan sumberdaya yang berkaitan dengan harga. Adapun harga setiap jenis pupuk bersubsidi diantaranya: Harga 1 kg subsidi pupuk Urea Rp 2.250, harga 1 Zak dengan berat 50 kg dijual dengan harga Rp.112.500, harga pupuk 1 kg NPK yaitu Rp 2300, harga 1 zak dengan 50 kg yaitu Rp 115.000 harga pupuk bersubsidi tersebut sudah di tetapkan oleh pemerintah. Hasil wawancara yang dilakukan di Desa Kalibagor terkait harga jual beli pupuk bersubsidi belum optimal.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan yaitu faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksana suatu kebijakan publik. Dari hasil wawancara terdapat 3 faktor dalam menentukan sikap pelaksana kebijakan, yaitu: (1) Tanggung jawab setiap implementor harus memiliki sikap tanggung jawab sehingga peraturan tentang pupuk bersubsidi berjalan sesuai dengan perutan dan tidak ada terjadinya kecurangan. (2) kemauan yang dimaksud yaitu setiap implementor harus memiliki kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan yang berlaku agar peraturan yang dibuat berjalan dengan lancar. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa para implementor yang terlibat memiliki kemauan terkait pelaksanaan pupuk bersubsidi agar pada saat proses penyaluran berjalan dengan lancar . (3) Kejujuran merupakan suatu sikap yang harus dimiliki setiap implementor untuk mematuhi peraturan dan tidak curang dalam menjual belikan pupuk bersubsidi, dikarenakan masi ada para Kios yang menjual pupuk bersubsidi melebihi Harga Eceran Tertinggi. Akan tetapi dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terdapat implementor atau kios yang tidak melakukan jual beli pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Sehingga sikap kejujuran terkait model Edwar III tidak berjalan optimal. (4) Konsisten juga termasuk kedalam hal yang perlu implementor miliki, dengan adanya konsisten yang dimiliki maka peraturan yang dibuat dalm bentuk kebijakan akan berjalan dengan lancar.

4. Birokrasi

Dalam Birokrasi terdapat 2 faktor yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik yaitu: (1) melakukan Standar Operasional Prosedures (SOP) sehingga pada proses penyaluran pupuk bersubsidi, proses penyaluran pupuk bersubsidi tidak sembarangan distributor mengirim ke

kios dan kios memberikan ke petani. Pemilihan distributor sudah ditentukan oleh pihak yang bertugas sehingga kios harus mengambil pupuk bersubsidi di distributor yang sudah ditentukan. Pada proses jual beli atau pengambilan pupuk ke kios petani akan membawa persyaratan yang sudah terdata di dalam RDKK. Selain itu SOP yang berlaku dikatakan kurang maksimal sebab masi ada para petani yang tidak memahani tetentang SOP yang ada, petani hanya mengetahui Cara pengambilan pupuk bersubsidi ke kios yang sudah ditentukan, petani tidak bisa mengambil pupuk bersubsidi di tempat lain dikarenakan dalm pembelian pupuk harus memberikan persyaratan yang sudah terdaftar di RDKK. (2) Kerja sama dengan organisasi yang dilakukan untuk menjalani suatu hubungan yang baik agar kerja sama yang dibangun berjalan dengan lancar. Tidak hanya itu kerja sama yang dilakukan dengan instansi lainnya sangatlah penting untuk memaksimalkan peraturan yang dibuat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan oleh pihak Dinas hingga ke Petani sudah dikatakan sesuai dengan peraturan Bupati tentang alokasi dan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi tahun Anggaran 2023.

2. Sumberdaya

Terhadap Sumberdaya yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo khususnya di bidang penyuluhan belum memadai.

3. Disposisi

Dari disposisi disposisi implementasinya bisa dikatakan tidak berjalan sesuai dengan Peraturan dikarenakan Sikap tanggung jawab, kejujuran terhadap kebijakan tidak berjalan dengan optimal dikarenakan pada jual beli pupuk bersubsidi masi ada pelaku yang tidak bertanggung jawab, tidak jujur dan tidak komitmen.

4. Struktur Birokrasi

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo telah menjalankan prosedeur sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 188/429/P/001.3/2022 Tentang Tata Cara Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023.

SARAN

Berdasarkan Kesimpulan diatas, dalam proses imlementasi pihak yang berwajib atau yang bertugas harus mengawasi setiap jalannya penyaluran pupuk bersubsidi agar tidak terjadinya kesalahan, terutama terkait harga pupuk bersubsidi. dikarenakan dalam implementasinya pihak yang mendistribusi pupuk bersubsidi bisa saja menaikkan harga subsidi pupuk.

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi berjudul "Implementasi Peraturan Bupati Situbondo Nomor 188/429/P/001.3/2022 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023 Di Desa Kalibagor Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo" dapat terselesaikan dengan baik.

- 22 1. Bapak Drs. Eddy Basuki M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 23 2. Bapak Drs. Senain M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak M.Zainy selaku kepala bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

REFERENSI

- AL QADRI, D. H. A. N. U. (2023). Penerapan Aplikasi e-Alokasi Pupuk Bersubsidi Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Aceh Tenggara (Doctoral disertation, Institut Pemerintah Dalam Negeri).
- Amalia, S. (2022). Dampak Kebijakan Pupuk Subsidi Terhadap Kesejahteraan Petani Di Kabupaten Pidie (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Fadel, M. F. P. A. M., & Aji, P. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 Mengenai Kartu Tani Di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Panga. *Repository FISIP UNSAP*, 21(1).
- Marfuah, I. S., & Irawan, Y. (2021). Sistem Informasi Penyaluran Bantuan Pupuk Bersubsidi Pada Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Rembang Berbasis Web. *Jurnal SITECH: Sistem Informasi dan Teknologi*, 4(1), 59-68.
- Melong.Lexy J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Putri, Noviantika. K. (2020). "Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 dan Fiqih Tas'ir (Studi kasus di Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen)", *Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAN), Surakarta Tahun 2020*.
- Rahmaan, B. A. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI MELALUI BILLING SYSTEM (Studi di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu).
- Sari, W. V. E. (2020). Analisis Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Solichin Abdul Wahab, (2008). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Solichin Abdul Wahab (2020). *Analisis Kebijakan Publik dari Formulasi Ke Implementasi. Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksar.

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 188/429/P/001.3/2022